

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 223 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019;
 - b. bahwa meraka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 (SATGAS) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menjadi *role model* Aparatur Sipil Negara (ASN) Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. mendorong terwujudnya kantor bebas dari Narkotika;
 3. kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional dalam rangka:
 - a. melaksanakan Penyuluhan Hukum Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melaksanakan tes urine di lingkungan kantor;
 - c. melaksanakan razia Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kantor; dan
 4. melaporkan kegiatan Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2019 kepada Koordinator SATGAS.
- KETIGA : Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 melakukan tugasnya sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 September 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2019

NOMOR : 223 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 September 2019

SATUAN TUGAS
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2019

Kedudukan dalam Tim	Jabatan
Pengarah	: 1. Roni Dwi Susanto 2. Setya Budi Arijanta
Koordinator	: Iwan Herniwan
Anggota	: 1. Seno Haryo Wibowo 2. Yudi Prasetiawan 3. Muhammad Sukron Arif 4. Mahfuzan Zakaria 5. Doddy Pascal 6. Syukri 7. Astri Erviana 8. Sazzali 9. Ahmad Wiza Walady 10. Vicky Virgiran Pamungkas 11. Mia Diana Putri Suryadi 12. Larasati Aisyah Retno Anjani 13. Muhammad Darwis Rambe 14. Firdo Budi Prasetyo 15. Tri Angga Putra Pamungkas 16. Wuri Setianingrum 17. Ahmad Khairunnas 18. Staf Direktorat Pengembangan Sistem Katalog 19. Staf Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I 20. Staf Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO